

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI  
KEUANGAN DAERAH DI KOTA  
PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

**RANGGA ADITYA PUTRA**

**01101003112**

**AKUNTANSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI**

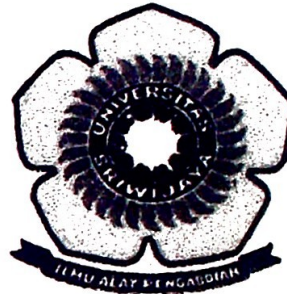
**2014**



R. 25938/26499

S  
657.307  
Ran  
P  
2014  
C. 141818

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI  
KEUANGAN DAERAH DI KOTA  
PALEMBANG**



**Skripsi Oleh:**

**RANGGA ADITYA PUTRA**

**01101003112**

**AKUNTANSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih*

*Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
2014**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**JUDUL SKRIPSI:**

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN  
DAERAH DI KOTA PALEMBANG**

Disusun oleh:

Nama : **Rangga Aditya Putra**  
NIM : **01101003112**  
Fakultas : **Ekonomi**  
Jurusan : **Akuntansi**  
Bidang Kajian/Konsentrasi : **Akuntansi Sektor Publik**

**Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif**

**Tanggal Persetujuan**

**Dosen Pembimbing**


Tanggal : 24 - 01 - 2014

Ketua : 

(Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak)

NIP 195808281988101001

Tanggal : 21 - 03 - 2014

Anggota :  IKA SASTI FERINA -

(Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak)

NIP 197802102001122001

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN  
DAERAH DI KOTA PALEMBANG**

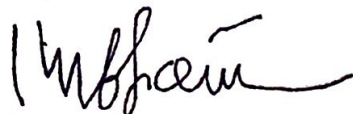
Disusun Oleh :  
NAMA MAHASISWA : RANGGA ADITYA PUTRA  
NIM : 01101003112  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN : AKUNTANSI  
BIDANG KAJIAN/KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 9 Juni 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

**Panitia Ujian Komprehensif**

**Inderalaya, 9 Juni 2014**

Ketua,




**Drs. Burhanuddin, M.Acc. Ak**  
NIP 195808281988101001

Anggota,



**Ika Sasti Ferina, S.E. M.Si. Ak**  
NIP 197802102001122001

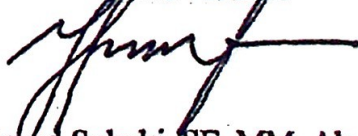
Anggota,



**Mukhtarudin, S.E. M.Si. Ak.CA**  
NIP. 196712101994021001

Mengetahui,

Ketua Jurusan



**Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA.**  
NIP 196508161995121001



## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rangga Aditya Putra  
NIM : 01101003112  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :  
Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan  
Keuangan Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah di kota  
Palembang.

Pembimbing :

Ketua : Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak  
Anggota : Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak  
Tanggal Ujian : 9 Juni 2014

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 9 Juni 2014



Pembuat Pernyataan,

Rangga Aditya Putra

NIM 01101003112

## RIWAYAT HIDUP

**Nama Mahasiswa** : **Rangga Aditya Putra**  
**Jenis Kelamin** : **Laki-Laki**  
**Tempat/Tanggal Lahir** : **Palembang, 28 Juli 1993**  
**Agama** : **Islam**  
**Status** : **Belum Menikah**  
**Alamat Rumah** : **Jln. Bungaran 2 Rt.02 Rw.01 No.69, Kelurahan  
8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang,  
Sumatera Selatan**  
**Alamat Email** : **[rangga.pg.smanta@gmail.com](mailto:rangga.pg.smanta@gmail.com)**

**Pendidikan Formal** :

**Sekolah Dasar** : **SD Negeri 125 Palembang (1998-2004)**  
**SLTP** : **SMP Negeri 15 Palembang (2004-2007)**  
**SMA** : **SMA Negeri 3 Palembang (2007-2010)**

**Pendidikan Non Formal** : **2013-2014 Brevet Pajak A dan B**  
**2010-2011 English Course Global**  
**2009-2010 English Course LBB LIA**

**Pengalaman Organisasi** : **2010-2012 Laskar Pelangi Basketball Club**



## *Motto :*

**“... Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap.” (QS. Alam Nasyrah Ayat 6-8)**

**“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.” (Sayidina Ali bin Abi Thalib)**

**Niat, Berdoa, Kerja keras, Berusaha, serta Percaya Atas Kuasa Allah, yakinlah semua akan indah pada waktunya**

### ***Ku Persembahkan Untuk :***

- **Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, Allah SWT**
- **Ibu dan Bapak Tercinta**
- **Keluarga Besarku Tercinta**
- **Orang-orang yang berjasa dalam hidupku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah di kota Palembang”.

Tujuan penulisan skripsi untuk menilai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan akuntabilitaas pengelolaan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah di kota Palembang. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai syarat pengajuan tugas akhir mahasiswa guna memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Topik ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena selama ini masih terdapat penyajian laporan keuangan daerah yang tidak sistematis dan tidak sesuai dengan ketentuan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah pun masih sangat kurang sehingga tujuan tercapainya penggunaan informasi keuangan daerah kemungkinan tidak tercapai dengan baik.

Penyusun menyadari skripsi ini masih jauh dari apa yang di harapkan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat di harapkan demi kesempurnaan hasil analisis ini. Akhirnya penyusun mengucapkan terima kasih yaang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga skripsi ini dapat selesai disusun dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat menunjang pencapaian sasaran dan tujuan perkuliahan.

Penulis



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah di Kota Palembang”** sebagai salah satu syarat kelulusan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Penulis tidak luput dari berbagai kendala dan masalah yang harus dihadapi. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Sriwijaya Ibu, Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
3. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M, Ak, CA
4. Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Bapak Mukhtaruddin, S.E., M.Si, Ak, CA
5. Dosen Pembimbing Skripsi I, Bapak Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak, CA yang telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, untuk membimbing dan memberikan saran yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dosen Pembimbing Skripsi II, Ibu Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak, CA yang telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, untuk membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para Dosen Penguji dalam seminar proposal maupun ujian komprehensif terimakasih atas bimbingan dan masukannya demi penyelesaian skripsi ini.
8. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Ariyanto S.E, M.Ti, Ak, CA yang telah mengarahkan urusan akademik mahasiswanya dan selalu mengingatkan kami dalam hal akademik.
9. Semua Bapak / Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. Para Anggota DPRD kota Palembang periode 2009-2014, Kepala Sekretariat DPRD Kota Palembang yang telah bersedia menjadi responden dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di lingkungan kerja DPRD.
11. Kepala Inspektorat Daerah kota Palembang, beserta pegawai, dan staff yang telah memberikan izin dan bersedia mengisi kuisisioner penelitian penulis.
12. Para Jurnalis Palembang, terimakasih atas kerjasamanya tetap berjuang mencari berita yang aktual dan terpercaya.
13. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Santoso Umbara, S.E dan Ibu Cholilah, S.E, terimakasih teramat sangat untuk semua yang telah diberikan selama ini, untuk kasih sayang, doa, dan dukungan yang tidak pernah putus.



14. Keluarga besarku tersayang, Bibi Nis, Bibi Nurma, Bibi Lidya, Paman Sumihar, Paman Dayat, Kakak Afick, dan Kakak Jimmy terimakasih atas perhatian, dukungan, dan doa kalian selama ini.
15. Untuk Diah Agustini terimakasih atas dukungan, doa, bantuan dan semangatnya.
16. Untuk sahabatku khususnya anggota Lences, Tornado, dan Dino, Usman, Yosafat, Romy, Husni, Septian, Ade, Akbar, Rizki, Otto, Januardi, Andika, Tendra, Naim, Saskia, Basyar, terima kasih atas kenangan yang terjadi saat kuliah, dan dukungannya selama ini.
17. Teman-teman seperjuangan selama masa kuliah, mahasiswa Akuntansi angkatan 2010, terimakasih teman-teman atas semua kerjasamanya selama ini.
18. Untuk pegawai jurusan Akuntansi, kakak Suryadi, terimakasih banyak atas bantuan selama masa kuliah yang sangat bermanfaat.
19. Untuk pegawai dekanat bagian kemahasiswaan, kakak Adi Sulono, terimakasih telah banyak membantu selama proses skripsi.  
Semoga Allah S.W.T membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, amin.

Penulis,

Rangga Aditya Putra

NIM 01101003112

## ABSTRAK

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah di kota Palembang

Oleh:

Rangga Aditya Putra

Penelitian ini dilakukan di kota Palembang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, sehingga diharapkan setelah selesainya penelitian ini dapat memberikan saran-saran dalam membantu pemerintah kota Palembang untuk meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah.

Sampel penelitian ini adalah para pengguna laporan keuangan daerah eksternal meliputi anggota DPRD kota, para pegawai di Inspektorat daerah, pers, dan lembaga non pemerintah yang berkonsentrasi pada anti korupsi. Metode pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah purposive sampling. Jenis data yang peneliti gunakan adalah data primer. Dalam melakukan pengujian model penelitian, peneliti menggunakan analisis statistik persamaan regresi linier berganda, adapun pengujian hipotesis dilakukan dengan uji koefisien determinasi, Uji T, dan Uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) secara bersama-sama atau simultan, variabel penyajian laporan keuangan daerah dan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah di kota Palembang; (b) dalam pengujian parsial didapatkan hasil bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan sedangkan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (X2) mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah di kota Palembang; (c) Hasil regresi menunjukkan R Square sebesar 0,319 atau 31,9% yang berarti korelasi antara variabel penyajian laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah di kota Palembang cukup besar.

***Kata kunci : laporan keuangan, akuntabilitas, dan penggunaan informasi***

## ABSTRACT

The Influence of Regional Financial Reports and Management Accountability,  
and their Users in Palembang City

By:

Rangga Aditya Putra;

Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak ; Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak

This research, undertaken in Palembang, was aimed at identifying the influence of regional financial reports and management accountability, and their users. It was expected to give suggestions and help increased use of the information contained in there.

The sample of this research consisted of external users that included regional house representatives, officers in inspectorate agencies, journalists, non-government anti-corruption organizations, and they were selected through purposive sampling. The primary data were analyzed by multiple linear regression computation and the hypothesis testing was done by co-efficient determination, t and F tests.

The research results show that simultaneously the reports and the management accountability had a significant and positive influence on the information users. In partial, the reports (X1) had a positive and significant influence whereas the management accountability had a positive but not significant influence on the information usage. Finally, the regression analysis resulted in the R Square value or 0.319 or 31.9% meaning that the correlation was big enough.

***Key words: financial reports, accountability, information usage***



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.5. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Landasan Teori .....	14
2.1.1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	14
2.1.2. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (PIKD) .....	16
2.1.3. Penyajian Laporan Keuangan Daerah (PLKD) .....	19
2.1.3.1. Laporan Realisasi Anggaran .....	21

2.1.3.2. Neraca Daerah .....	23
2.1.3.3. Laporan Arus Kas .....	25
2.1.3.4. Catatan Atas Laporan Keuangan .....	26
2.1.4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD).....	28
2.2. Penelitian Terdahulu .....	30
2.3. Kerangka Pemikiran .....	33
2.4. Hipotesis .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1. Ruang Lingkup Pnelitian .....	35
3.2. Jenis Penelitian .....	35
3.3. Sumber Data .....	35
3.4. Populasi dan Sampel .....	36
3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	39
3.5.1. Variabel Terikat ( <i>Dependent Variable</i> ) .....	39
3.5.2. Variabel Bebas ( <i>Independent Variable</i> ) .....	40
a. Penyajian Laporan Keuangan Daerah (PLKD) .....	40
b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD)	41
3.6. Teknik Analisis Data .....	44
3.6.1. Tingkat Respon .....	44
3.6.2. Pengujian Instrumen .....	44
a. Uji Validitas .....	44
b. Uji Realibilitas .....	45
3.6.3. Analisis Statistik Deskriptif .....	45
3.6.4. Uji Normalitas .....	46
3.6.5. Teknik Analisis Kuantitatif .....	46
3.6.5.1 Pengujian Hipotesis .....	46
a. Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	47
b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) .....	47
c. Uji Simultan F-test .....	48

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	49
4.1.1. Hasil Analisis Tingkat Respon .....	49
4.1.2. Karakteristik Responden .....	49
4.1.3. Hasil Uji Instrumen Penelitian .....	51
1. Uji Validitas .....	51
2. Uji Reliabilitas .....	53
4.1.4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	54
4.1.5. Hasil Analisis Uji Normalitas .....	55
1. Analisis Grafik .....	55
2. Analisis Statistik .....	56
4.2. Pengujian Hipotesis .....	57
a. Uji Koefisien Determinasi .....	59
b. Uji Parsial dengan T-Test .....	60
c. Uji Simultan dengan F-Test .....	62
4.3. Pembahasan Hasil .....	64
4.3.1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah di kota Palembang .....	64
4.3.2. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah di kota Palembang .....	65
4.3.3. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah di kota Palembang .....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
5.1. Kesimpulan .....	68



5.2. Saran .....	69
5.3. Keterbatasan Penelitian .....	70
5.4. Implikasi .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Jumlah Populasi, Sampel, dan Responden ..... 36
Tabel 3.2	Kode dan Pilihan Jawaban beserta Skor Jawaban untuk Variabel Penggunaan Informasi Keuangan Daerah ..... 40
Tabel 3.3	Kode dan Pilihan Jawaban beserta Skor Jawaban untuk Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah ..... 41
Tabel 3.4	Kode dan Pilihan Jawaban beserta Skor Jawaban untuk Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ..... 42
Tabel 3.5	Variabel Penelitian, Definisi Operasional, Indikator Variabel, dan Skala Pengukuran ..... 43
Tabel 4.1	Tingkat Pengembalian Kuisisioner ..... 49
Tabel 4.2	Karakteristik Responden ..... 50
Tabel 4.3	Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ..... 56
Tabel 4.4	Variables Entered/Removed ..... 58
Tabel 4.5	Hasil Uji Koefisien Determinasi ..... 59
Tabel 4.6	Hasil Uji T ..... 60
Tabel 4.7	Hasil Uji F ..... 63

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kurva P-Plot Normal .....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Daftar Pertanyaan ..... 74
Lampiran 2	Hasil Rekapitulasi Daftar Pertanyaan Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah ..... 82
Lampiran 3	Hasil Rekapitulasi Daftar Pertanyaan Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ..... 87
Lampiran 4	Hasil Rekapitulasi Daftar Pertanyaan Variabel Penggunaan Informasi Keuangan Daerah ..... 89
Lampiran 5	Hasil Uji Validitas atas item pertanyaan penyajian laporan keuangan daerah (X1) ..... 94
Lampiran 6	Hasil Uji Validitas atas item pertanyaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (X2) ..... 95
Lampiran 7	Hasil Uji Validitas atas item pertanyaan penggunaan informasi keuangan daerah (Y) ..... 96
Lampiran 8	Hasil Uji Reliabilitas setiap variabel X1,X2, dan Y ..... 97
Lampiran 9	Hasil Analisis Statistik Deskriptif – Penyajian Laporan Keuangan Daerah ..... 98
Lampiran 10	Hasil Analisis Statistik Deskriptif – Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ..... 99
Lampiran 11	Hasil Analisis Statistik Deskriptif – Penggunaan Informasi Keuangan Daerah ..... 100

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang

Terjadinya reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam [www.detik.com](http://www.detik.com). Hal tersebut di tandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang di atas membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Sebagai operasionalnya maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberlakukan otonomi daerah merupakan langkah yang konkrit dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Maksud dari Pemerintah Pusat memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Seiring adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk

mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah tersebut.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia (Indra Hardianto, 2010).

Pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pendayagunaan potensi keuangan daerah dan mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat-daerah dan antar daerah. Pendanaan pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif.

Eksekutif Daerah harus membuat sebuah laporan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya setiap tahun dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan menyebarluaskan kepada masyarakat. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah membuat peraturan mengenai pertanggungjawaban keuangan dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pemerintah Daerah secara tegas disebutkan bahwa kepala daerah harus mempertanggungjawabkan Keuangan Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan. Beberapa survei yang ditemui di beberapa pemda, menemukan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menyusun laporan keuangan yang dimaksudkan (Bandariy, 2011).

Dalam pengelolaan keuangan harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi (PP. No. 58 Tahun 2005). Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan hasil laporan keuangan yang akuntabel.

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan

dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mahmudi, 2011).

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja.

Akuntabilitas publik pengelolaan keuangan pemerintah dapat diwujudkan dengan penyajian laporan keuangan yang terdiri dari laporan periodik (*periodic reports*), laporan keuangan interim (*interim financial reports*), dan laporan keuangan tahunan (*annual financial reports*). Dari ketiga laporan keuangan tersebut, yang wajib dipublikasikan oleh pemerintah agar dapat diakses publik adalah laporan keuangan tahunan. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi pemerintah (Abdul Rohman, 2009). Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.



Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas finansial (*financial accountability*), akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*), akuntabilitas hukum (*legal accountability*), akuntabilitas politik (*political accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat maupun didaerah sebagai jawaban atas fenomena reformasi birokrasi dan perkembangan sektor publik di Indonesia tidak dapat terhindarkan (Halim & Syam, 2011).

Terdapatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan khususnya dalam mengelola keuangan daerah/negara ternyata belum berjalan sesuai. Dalam [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) indikasinya dari laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2008 mengumumkan adanya penyelidikan terhadap 70 kasus, 46 penyidikan, 43 penuntutan, 25 perkara telah diputus di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar dari perkara tersebut berkenaan dengan penyalahgunaan APBN/APBD berhubungan APBN/APBD merupakan inti keuangan (akuntansi) pemerintahan, sehingga adanya penyalahgunaan memprediksi laporan *financial* (laporan keuangan) tidak dihasilkan dengan benar dan diandalkan. Data dari KPK tersebut menggambarkan upaya pemerintah belum selesai dan ini akan menjadi

tantangan besar pemerintah kedepan agar lebih akuntabel dalam mengelola dana publik.

Dilihat dari sisi lain, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK RI) terhadap seluruh laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) se-Indonesia, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kota Palembang dari tahun 2006-2012, memberikan opini beragam setiap tahunnya terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Prestasi buruk pernah dicapai oleh kota Palembang dalam penyajian informasi laporan keuangan daerah untuk diaudit oleh BPK, yaitu di tahun 2006 pernah mendapat opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat), sedangkan di tahun 2007-2009 mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dalam [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).

Dalam pemeriksaan BPK RI atas audit terhadap laporan keuangan kota Palembang setiap tahunnya menggambarkan masih terjadinya kesalahan prosedur ketika melakukan pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan. Pada tahun 2010 pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Palembang, BPK secara terperinci menemukan beberapa kelemahan meliputi, kelemahan system pengendalian akuntansi dan pelaporan (pencatatan belum/tidak dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan tidak sesuai ketentuan, entitas tersebut menyampaikan laporan) ditemukan 1.401 kasus dari beberapa LKPD se-Indonesia, Palembang ditemukan sebanyak 2 kasus. Selanjutnya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengakibatkan terjadinya kerugian negara, kekurangan penerimaan, dan kesalahan administrasi. Berdasarkan audit

BPK, LKPD kota Palembang ditemukan sebanyak 11 kasus dari 4.551 kasus LKPD se Indonesia (dalam [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Himmah Bandariy (2011), dengan menambahkan satu variabel yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini penulis menambah satu variabel yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dikarenakan dalam penelitian sebelumnya oleh Fachrul Anggi (2012) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban (akuntabilitas) laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku menjadi fokus utama untuk menjadikan pemerintahan yang *good governance*, dan secara langsung akan berdampak terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Ini berarti selain penyajian laporan keuangan daerah ada variabel lain yang diharapkan dapat mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yakni akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melihat hasil dari beberapa penelitian sebelumnya, terjadi perbedaan pendapat menunjukkan bahwa penggunaan informasi keuangan daerah cenderung berbeda di setiap daerah. Masalah ini yang kemudian juga tertulis dalam berita yang dipublikasikan oleh Antara Sumsel tahun 2012.

Menurut berita dalam [www.antarasumsel.com](http://www.antarasumsel.com) pada tanggal 30 Juli 2012 berjudul “Masih minimnya penggunaan informasi keuangan di Palembang” didalam berita itu dijelaskan bahwa hasil survei menyatakan sebagian besar masyarakat kota Palembang masih minim dalam penggunaan informasi keuangan daerah. Survei ini mengambil responden yang telah terpilih dari beberapa kriteria yang telah ditentukan. Hanya terdapat sekitar 55% responden yang dapat

memperoleh, membaca, memahami dan menggunakan informasi keuangan pemerintah. Minimnya penggunaan informasi itu disebabkan oleh kurangnya pengertian masyarakat (*stakeholder*) mengenai isi dari laporan keuangan dan tanggung jawab pemerintah atas laporan keuangan tersebut. Dalam berita itu menunjukkan bahwa peran pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan yang relevan dan akuntabel masih kurang walaupun pada LKPD Kota Palembang dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2010-2011 opini audit BPK menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini mencerminkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaan informasi keuangan daerah dapat digunakan dengan baik oleh stakeholder.

Hal tersebut yang menyebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan masih terdapat masalah sehingga tidak terlaksana dengan tepat dan benar. Masalah yang dihadapi pemerintah daerah saat ini bukan hanya penyajian laporan keuangan yang akuntabel tetapi juga bagaimana pemerintah dapat meningkatkan penggunaan informasi daerah oleh masyarakat sebagai fasilitas masyarakat untuk memenuhi fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan penyajian laporan keuangan daerah yang akuntabel dan laporan keuangan daerah yang dapat memberikan informasi yang relevan serta dapat diserap dengan baik oleh masyarakat (*stakeholder*) secara keseluruhan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan SAP membawa konsekuensi juga pada perubahan sistem akuntansi. Sistem akuntansi memang tidak diatur dalam SAP tetapi entitas harus merancang sistem akuntansinya sendiri yang dapat menghasilkan laporan

keuangan sesuai SAP. Perubahan-perubahan yang ada pada sistem akuntansi itu secara wajar berpengaruh pada undang-undang yang mengatur mengenai akuntabilitas publik.

Dalam informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Sebagai penyelenggara amanat rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan yang sesuai koridornya (*Good Governance*), salah satunya adalah memberikan penjelasan kepada pihak-pihak berkepentingan termasuk masyarakat luas dalam bentuk laporan keuangan daerah yang sesuai dengan apa yang terjadi diperlaksanaannya, juga mematuhi ketentuan yang ada. Masyarakat (*stakeholders*) sebagai pengguna laporan keuangan dalam hal ini yaitu DPRD kota Palembang, Inspektorat kota Palembang dan Insan pers serta *Non Government Organization* (NGO) yang mewakili masyarakat luas. Pemerintah daerah sepatutnya dan sewajarnya memfasilitasi masyarakat atau stakeholders untuk memperoleh informasi dan penjelasan terhadap penggunaan dana yang dipakai dalam pembangunan suatu daerah khususnya di kota Palembang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah



wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban itu tidak hanya wajib disampaikan kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemberi mandat atau kekuasaan kepada pemerintah. Walaupun dalam kenyatannya operasional PP Nomor 58 Tahun 2005 tersebut sudah cukup baik namun tujuan utamanya untuk memberikan informasi yang relevan dan akuntabel terhadap pihak ekstern khususnya masyarakat luas masih kurang dapat dilihat dari minimnya penggunaan informasi keuangan kota Palembang. Dalam penggunaan informasi keuangan daerah yang dilakukan oleh pihak intern dan ekstern. Masyarakat sebagai pihak ekstern berhak meminta informasi dari lembaga publik asalkan mempunyai alasan logis dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjadi landasan bagi masyarakat bisa memperoleh informasi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka topik tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah penting untuk diteliti mengingat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang diindikasikan melalui seberapa pentingnya penggunaan informasi keuangan daerah tersebut berimbas kepada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta peraturan pemerintah yang mewajibkan penyajian laporan keuangan secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah**

## **dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah”.**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Dari penjabaran latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah ?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah ?
3. Bagaimana penyajian laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam kaitannya dengan masalah ini, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengkaji dan mengukur pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap upaya mengoptimalkan penggunaan informasi keuangan daerah
2. Mengkaji dan mengukur pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap upaya mengoptimalkan penggunaan informasi keuangan daerah

3. Mengkaji dan mengukur pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap upaya mengoptimalkan penggunaan informasi keuangan daerah

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi DPRD sebagai pengguna utama laporan keuangan mendorong agar lebih menyadari pentingnya laporan keuangan daerah sebagai alat untuk mengawasi pengelolaan sumber daya pemerintah daerah dan menilai kinerja keuangan pemerintah secara lebih baik.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.
4. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pembelajaran dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan daerah.

## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

- **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian sebelumnya, yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan Judul Penelitian yang diajukan.

- **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode analisa data.

- **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data, hasil analisis, dan pembahasan.

- **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk obyek penelitian ataupun bagi peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggi, Fachrul. 2012. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Sriwijaya.
- Ardiansyah, Dendi. 2012. Pengaruh Sistem Penempatan Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sumsel. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya.
- Bandariy, Himmah. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi empiris di kabupaten eks kresidenan Banyumas). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Diponegoro.
- Governmental Accounting Standard Board. 1998. *Governmental Accounting and Financial Reporting Standards*. GASB, Norwalk, Conn.
- Halim, Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hardianto, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi keempat. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS18*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua. Bandung: Penerbit UII Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo, 2006, "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance", *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol.2 No.1 Mei 2006, hal 1-17.
- Mohamad, Ismail; Sjahrudin Rasul dan Haryono Umar. 2004. *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Mulyana, Budi, 2006. "Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas



Pengelolaan Keuangan Daerah”, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, volume 2, Nomor 1, Universitas Gajah Mada, hal 65-78.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Rahmawati, Okta Dwi. 2011. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Safitri, Ratna Amalia and Rohman, Abdul. 2009. *Aksesibilitas, penyajian dan penggunaan informasi keuangan daerah (Studi empiris di Kabupaten Semarang)*. Perpustakaan FE UNDIP.

Tim Penyusun Pedoman Skripsi. 2012. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*. Inderalaya; Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Wiltono, Banu. 2003. “Optimalisasi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah”. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol.2, No. 2, September 2003.

[www.antarasumsel.com](http://www.antarasumsel.com) diakses 14 Februari 2013.

[www.bpk.go.id/web](http://www.bpk.go.id/web) diakses 24 Februari 2013.

[www.detik.com](http://www.detik.com) diakses 14 Februari 2013.

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) diakses 28 Juli 2013.

[www.trijayafmplg.wordpress.com](http://www.trijayafmplg.wordpress.com) diakses 1 maret 2013